

Kesejahteraan dan Bela Negara di Indonesia: Kajian Literatur Perspektif Kewargaan

Nebula Fauzan Hasani¹, Ana Sabhana Azmy²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

nebulaf@upnij.ac.id, anasabhanazmy@upnij.ac.id

Abstract

This research explores the relationship between state defence awareness, citizenship, and welfare based on an analysis of literature over the past ten years. Citizenship is understood through the perspective of T.H. Marshall's theory that integrates civil, political, and social rights, as well as Hiariej and Stokke's approach that sees citizenship as a dynamic social practice. This research uses the literature study method by collecting literature reviews over the past 10 years related to welfare and state defence. The results of the analysis show that the fulfilment of social rights, such as access to education and health, is an important element in strengthening active citizen participation in state defence. Poverty alleviation through inclusive policies proves to be a prerequisite for strengthening inclusive citizenship and national solidarity. In terms of education, civic education plays an important role in instilling values of nationalism, solidarity, and social responsibility, which expands the meaning of state defence to the social and economic spheres. Thus, the results of this study emphasise the importance of integration between welfare, citizenship, and state defence to create a just, cohesive, and resilient society.

Keywords: state defence, citizenship, welfare, poverty

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kesadaran bela negara, kewargaan, dan kesejahteraan berdasarkan analisis literatur selama sepuluh tahun terakhir. Kewargaan dipahami melalui perspektif teori T.H. Marshall yang mengintegrasikan hak sipil, politik, dan sosial, serta pendekatan Hiariej dan Stokke yang melihat kewargaan sebagai praktik sosial dinamis. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan karya-karya ilmiah selama 10 tahun terakhir terkait kesejahteraan dan bela negara, yang kemudian dianalisis melalui proses seleksi sistematis dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan konsep, dan temuan kunci dari penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak sosial, seperti akses terhadap pendidikan dan kesehatan, merupakan elemen penting dalam memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam bela negara. Pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang inklusif terbukti menjadi prasyarat untuk memperkuat kewargaan yang inklusif dan solidaritas nasional. Dalam aspek pendidikan, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, yang memperluas makna bela negara ke ranah sosial dan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menekankan pentingnya integrasi antara

kesejahteraan, kewargaan, dan bela negara untuk menciptakan masyarakat yang adil, kohesif, dan tangguh.

Kata kunci: *bela negara, kewargaan, kesejahteraan, kemiskinan*

Pendahuluan

Kesejahteraan dalam politik kewargaan merupakan elemen penting yang sering kali menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya. Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti pendapatan atau akses terhadap layanan publik, tetapi juga menyangkut pengakuan sosial dan hak-hak kultural yang membuat warga merasa dihargai dan terhubung dengan negara. Dalam konteks kewargaan, distribusi kesejahteraan yang merata dapat menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan partisipasi warga dalam kehidupan politik serta memperkuat kohesi sosial. Namun ketika distribusi ini tidak merata, terutama dalam wilayah-wilayah yang kaya sumber daya seperti industri ekstraktif, hal tersebut menjadi sebuah ketidakpuasan yang muncul dan dapat memicu ketegangan politik serta menghambat proses demokratisasi. Salah satu contoh dalam politik kewargaan Indonesia adalah bagaimana gerakan masyarakat yang menuntut keadilan atas distribusi hasil industri ekstraktif menunjukkan ketegangan antara kesejahteraan dan hak-hak warga negara (Hiariej & Stokke, 2022).

Dalam konteks negara, Indonesia menghadapi masalah serius terkait ketidakmerataan kesejahteraan di berbagai wilayahnya. Dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara yang terkaya dan masyarakat lainnya di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlambat pengurangan kemiskinan, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur semakin memperburuk situasi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil (Luke, 2017).

Dalam situasi ketidakmerataan tersebut pemerintah selain melakukan implementasi program kebijakan ekonomi, pemerintah telah mencanangkan program Bela Negara untuk memperkuat kewargaan dan meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya mempertahankan negara. Program ini bertujuan untuk

membangun karakter bangsa yang tangguh dan siap menghadapi ancaman multidimensi. Namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa semua elemen masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan, dapat berpartisipasi aktif dalam program ini. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali merasa terpinggirkan dari narasi kewargaan yang ditawarkan oleh negara, sehingga peran mereka dalam kewajiban bela negara mungkin terasa kurang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemiskinan tersebut selain berdampak pada peran masyarakat pada kewajiban bela negara tersebut tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga berdampak pada rasa keterikatan emosional dan partisipasi sosial warga terhadap negara. Menurut Hiariej & Stokke (2022), politik kewargaan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh struktur ketidakadilan sosial-ekonomi yang membuat masyarakat marginal merasa terpinggirkan. Kondisi ini, dalam konteks bela negara, dapat mempengaruhi tingkat partisipasi warga miskin. Banyak aspek yang belum terjawab, termasuk bagaimana perasaan keterasingan dan kurangnya akses terhadap layanan publik memengaruhi komitmen warga dalam mendukung upaya bela negara. Kondisi marginalisasi ini menuntut kajian lebih lanjut untuk memahami hubungan antara ketidakmerataan kesejahteraan dan kewargaan, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kesadaran dan partisipasi warga dalam program bela negara (Balibar & Swenson, 2004; Conceicao, 2019; McNevin, 2011).

Ketidakadilan dalam distribusi kesejahteraan menciptakan jurang sosial antara mereka yang mendapat manfaat dari pembangunan dan mereka yang merasa terpinggirkan. Di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Papua dan Kalimantan, ketidakmerataan ini semakin terasa. Meskipun wilayah-wilayah ini kaya secara sumber daya, masyarakat lokal sering kali tidak mendapatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan yang memperkuat perasaan keterasingan (Conceicao, 2019; World Bank, 2020). Situasi ini diduga berkontribusi pada menurunnya kesadaran warga terhadap kewajiban bela negara. Namun, sejauh mana ketidakmerataan kesejahteraan ini memengaruhi hubungan warga negara dengan negara masih memerlukan kajian lebih lanjut. Perasaan keterasingan dan kurangnya

keterlibatan sosial tampaknya dapat melemahkan tanggung jawab warga untuk berpartisipasi dalam mempertahankan negara, tetapi mekanisme yang mendasari proses ini masih perlu diteliti lebih mendalam (Conceicao, 2019).

Selain itu, kemiskinan berdampak pada konsep *belonging* dan *membership* dalam politik kewargaan. Konsep *membership* merujuk pada pengakuan formal seseorang sebagai bagian dari komunitas politik, sedangkan konsep *belonging* mengacu pada perasaan keterikatan emosional terhadap komunitas tersebut (McNevin, 2011). Ketika masyarakat miskin merasa terpinggirkan dari kewargaan, mereka cenderung merasa tidak memiliki ikatan dengan negara. Proses marginalisasi ini menciptakan hambatan struktural yang membuat warga miskin sulit untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan bernegara, yang pada akhirnya mengurangi rasa tanggung jawab mereka dalam bela negara (Balibar & Swenson, 2004).

Kewargaan sangat terkait dengan distribusi kesejahteraan yang adil, di mana hak-hak sosial setiap warga negara harus terpenuhi untuk memastikan keterlibatan penuh mereka dalam kehidupan politik. Menurut T.H. Marshall, dimensi sosial dari kewargaan sangat bergantung pada pemenuhan hak-hak sosial, seperti akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Marshall melihat kewargaan sebagai kewargaan tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak sosial yang memberikan individu kemampuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Ketika hak-hak sosial ini tidak terpenuhi, masyarakat yang berada dalam kemiskinan sering kali merasa tersisih dari proses pembangunan nasional. Akibatnya, mereka merasa tidak terlibat sepenuhnya dalam tanggung jawab kewargaan, termasuk dalam partisipasi dalam upaya bela negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak sosial menjadi kunci penting dalam memperkuat rasa keterikatan warga terhadap negara dan meningkatkan kesadaran mereka untuk terlibat aktif dalam kewajiban bela negara (Marshall & Bottomore, 1992).

Program bela negara yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan. Kesadaran bela negara tidak hanya menjadi tanggung jawab militer, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman non-

militer seperti kemiskinan, radikalisme, dan ketidakadilan sosial. Kebijakan ini menekankan pentingnya partisipasi semua lapisan masyarakat dalam menjaga pertahanan negara, termasuk masyarakat miskin yang sering kali merasa terpinggirkan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada pertanyaan penelitian bagaimana penelitian 10 tahun terakhir mendeskripsikan hubungan antara kesadaran bela negara dan kesejahteraan sebagai salah satu indikator kewargaan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis literatur terkait dengan bela negara, kesejahteraan, dan kewargaan selama sepuluh tahun terakhir yang membahas hubungan antara persepsi mengenai bela negara dan kesejahteraan dalam perspektif kewargaan.

Pendekatan studi literatur dipilih karena isu mengenai kewargaan, kesejahteraan, dan Bela Negara bersifat konseptual dan multidimensi, sehingga memerlukan penelusuran mendalam terhadap perkembangan teori dan temuan empiris dalam satu dekade terakhir. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini dapat memetakan secara komprehensif pola hubungan, pergeseran perspektif, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi dinamika ketiga konsep tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai jenis temuan, mengidentifikasi konsistensi maupun kontradiksi antar penelitian, serta menemukan kesenjangan riset yang belum banyak dieksplorasi. Dengan demikian, kajian literatur tidak hanya berfungsi sebagai dasar teoretis, tetapi juga sebagai alat analitis untuk menafsirkan bagaimana faktor kesejahteraan dan kewargaan berkontribusi pada pembentukan kesadaran Bela Negara dalam berbagai konteks sosial.

Metode Penelitian

Tujuan Studi Literatur

Penelitian ini merupakan Studi Literatur Sistematis (*systematic literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis informasi penting dari kajian-kajian yang relevan terkait hubungan antara kesadaran

bela negara dan kesejahteraan dalam kerangka teoretis kewargaan. Prosedur studi literatur dalam penelitian ini merujuk kepada metode studi literatur Kitchenham (2004) dengan penyesuaian untuk konteks ilmu sosial-kewargaan. Metode ini dipilih karena fleksibilitas penerapannya yang memungkinkannya diterapkan pada penelitian sosial. Beberapa penelitian SLR di ranah sosial-politik multidisiplin menggunakan metode ini, misalnya Harwenda et al. (2025) dan Mulia et al. (2021). Langkah-langkah yang dilaksanakan terdiri dari: (1) perencanaan (penetapan tujuan dan prosedur studi literatur), (2) pelaksanaan (pengumpulan karya literatur, seleksi karya literatur, ekstraksi data, dan sintesis data), dan (3) penyajian hasil studi literatur.

Proses Pengumpulan dan Seleksi Karya Literatur

Pengumpulan karya literatur melibatkan identifikasi dan seleksi menggunakan kata kunci tertentu pada basis data daring seperti basis data Taylor & Francis, Google Scholar, dan JSTOR. Basis data karya literatur tersebut dipilih karena banyaknya karya literatur yang berfokus pada topik patriotisme dan kewargaan yang dimuat. Kata kunci yang digunakan adalah: {"bela negara", "kesadaran", "kewargaan", "kesejahteraan", "patriotism", "awareness", "citizenship", "welfare"}. Kriteria seleksi terdiri dari kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Artikel dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terindeks, prosiding konferensi, laporan penelitian resmi, atau buku akademik.
2. Publikasi berbahasa Indonesia atau Inggris.
3. Memuat pembahasan yang berkaitan dengan kewargaan, kesejahteraan, patriotisme, atau bela negara.
4. Menyediakan data empiris atau analisis teoretis yang dapat diekstraksi.

Kriteria eksklusi yang digunakan adalah sebagai berikut.

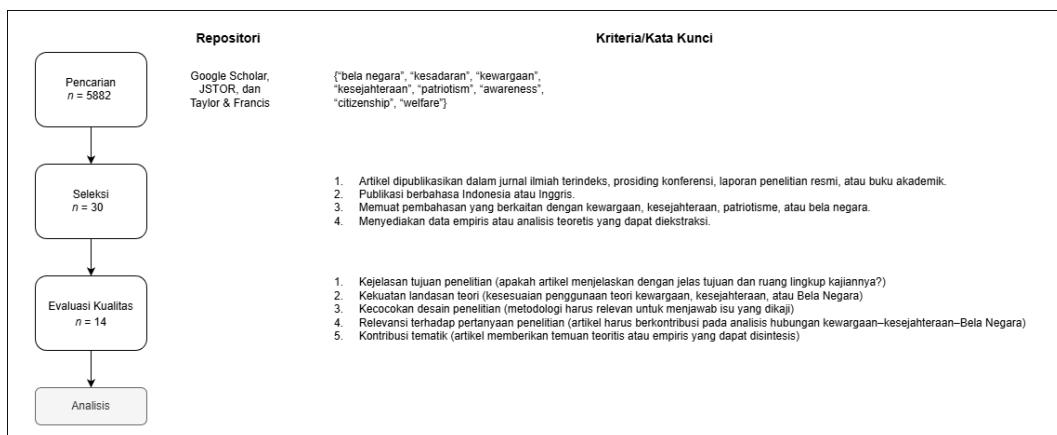
1. Terbit di luar rentang waktu 2014–2024.
2. Tidak dapat diakses secara penuh oleh peneliti.

3. Artikel berupa opini populer yang tidak melalui *peer-review*.
4. Tidak menampilkan keterkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Berdasarkan prosedur dan kriteria di atas, diperoleh 30 artikel. Setelah itu, diterapkan evaluasi kelayakan artikel oleh tim penulis dengan mempertimbangkan kualitas penulisan dan desain penelitian. Proses evaluasi artikel dilakukan berdasarkan lima kriteria berikut ini.

1. Kejelasan tujuan penelitian (apakah artikel menjelaskan dengan jelas tujuan dan ruang lingkup kajiannya?)
2. Kekuatan landasan teori (kesesuaian penggunaan teori kewargaan, kesejahteraan, atau Bela Negara)
3. Kecocokan desain penelitian (metodologi harus relevan untuk menjawab isu yang dikaji)
4. Relevansi terhadap pertanyaan penelitian (artikel harus berkontribusi pada analisis hubungan kewargaan–kesejahteraan–Bela Negara)
5. Kontribusi tematik (artikel memberikan temuan teoritis atau empiris yang dapat disintesis)

Prosedur dan informasi lebih detail mengenai jumlah artikel yang lolos seleksi ditampilkan pada Gambar 1. Selanjutnya, Tabel 1 melampirkan 14 artikel yang lolos evaluasi tersebut dan dipergunakan untuk analisis lebih lanjut.



Gambar 1. Prosedur Seleksi Karya Literatur

Tabel 1. Daftar Artikel yang Lolos Seleksi Karya Literatur

No.	Judul & Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Teori Kewargaan	Konsep Bela Negara	Faktor Kesejahteraan	Temuan Utama	Konteks Negara / Masyarakat
1.	<i>Tafsir Umum Terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bela Negara Menurut UUD 1945.</i> Taupan (2023)	Menganalisis hak & kewajiban warga negara dalam konteks Bela Negara menurut UUD 1945	Marshall - hak sipil, politik, sosial	Bela Negara sebagai kewajiban konstitusional	Tidak dibahas	Hak & kewajiban warga negara menjadi fondasi kesadaran bela negara	Indonesia
2.	<i>Memahami Konsep Bela Negara dan Pentingnya Diseminasi kepada Generasi Muda.</i> Khasanah et al. (2022)	Menjelaskan pentingnya diseminasi konsep Bela Negara kepada generasi muda	Civic education	Patriotisme, identitas nasional, bela negara edukatif	Tidak dibahas	Diseminasi PKn memperkuat kesadaran bela negara generasi muda	Pelajar Indonesia
3.	<i>Islamic Movement Global Jihad: Analysis of Online Media Framing.</i> Suprabowo & Hapsari (2020)	Menganalisis framing media terhadap gerakan jihad global	Tidak dibahas	Patriotisme negatif vs. ekstremisme	Tidak dibahas	Narasi ekstremisme dapat melemahkan identitas nasional	Media online Indonesia
4.	<i>Implementasi Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau.</i> Lamidi (2023)	Menganalisis implementasi penguatan Bela Negara di wilayah perbatasan	Kewargaan partisipatoris	Bela Negara non-militer, partisipasi warga	Akses layanan publik & kondisi sosial ekonomi	Akses layanan publik memengaruhi tingkat kesadaran bela negara	Kepri (wilayah perbatasan)
5.	<i>Pobreza y desigualdad en México. La construcción ideológica y fáctica de ciudadanías diversas y desiguales.</i> Damián (2019)	Menelaah ketimpangan & kemiskinan dalam konstruksi kewargaan di Meksiko	Inequality citizenship theory	Tidak dibahas	Ketimpangan pendapatan & akses sosial	Ketimpangan melemahkan kewargaan inklusif	Meksiko

No.	Judul & Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Teori Kewargaan	Konsep Bela Negara	Faktor Kesejahteraan	Temuan Utama	Konteks Negara / Masyarakat
6.	<i>Higher Education in the Fight Against Poverty from the Capabilities Approach: The Case of Spain.</i> Sanz et al. (2017)	Peran pendidikan tinggi dalam pengentasan kemiskinan berbasis kapabilitas	<i>Capability approach</i>	Tidak dibahas	Pendidikan sebagai kapabilitas sosial	Pendidikan meningkatkan kemampuan kewargaan aktif	Spaniol
7.	<i>Framing Welfare Expansion: Citizenship, Collective Memory, and Fiscal Dilemmas in Mexico and Peru.</i> Campos Ugaz (2024)	Ekspansi kesejahteraan melalui memori kolektif & kewargaan	<i>Welfare citizenship</i>	Tidak dibahas	Program sosial, narasi kesejahteraan	Memori kolektif memperkuat legitimasi kebijakan sosial	Meksiko & Peru
8.	<i>Poverty Dynamics in Indonesia: The Prevalence and Causes of Chronic Poverty.</i> Sugiharti et al. (2022)	Menganalisis dinamika kemiskinan kronis di Indonesia	<i>Social policy & poverty studies</i>	Tidak dibahas	Kemiskinan rumah tangga, aset, pendidikan	Kemiskinan kronis menurunkan partisipasi sosial	Indonesia
9.	<i>Implementasi Literasi Budaya dan Kewargaan untuk Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa Madrasah Ibtidaiyah di Tengah Pandemi Ahsani & Azizah (2021)</i>	Mengembangkan keterampilan sosial siswa melalui literasi budaya & kewargaan	<i>Civic skills</i>	Tidak dibahas	Kualitas pendidikan & literasi	Literasi budaya → empati → kewargaan sosial	Madrasah Indonesia
10.	<i>Atribusi Kewargaan Digital Dalam Literasi Digital.</i> Pradana (2018)	Menjelaskan atribusi kewargaan digital dalam literasi digital	<i>Digital citizenship</i>	Tidak dibahas	Akses digital, kesenjangan digital	Literasi digital menentukan partisipasi kewargaan	Indonesia
11	<i>From Marshallian Citizenship to Corporate Citizenship: The Changing Nature of Citizenship in Neoliberal Britain.</i> Bell (2016)	Transformasi kewargaan menuju kewargaan korporasi dalam neoliberalisme	Marshall → Neoliberal citizenship	Tidak dibahas	Privatisasi layanan publik	Peran negara melemah, peran korporasi menguat dalam kewargaan	Inggris

No.	Judul & Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Teori Kewargaan	Konsep Bela Negara	Faktor Kesejahteraan	Temuan Utama	Konteks Negara / Masyarakat
12	<i>The Role of Organizational Citizenship Behavior and Patriotism in Sustaining Public Health Employees' Performance.</i> Rizaie et al. (2023)	Menguji OCB & patriotisme terhadap kinerja pegawai kesehatan	<i>Organizational citizenship</i>	Patriotisme konstruktif	Kinerja layanan publik	Patriotisme → OCB → peningkatan kinerja	Iran / sektor kesehatan global
13	<i>The Role of Constructive Patriotism in the Relationship of Basic Human Values and Active Citizenship for Emerging Adults in Türkiye.</i> Elban & Aslan (2023)	Peran nilai dasar manusia terhadap kewargaan aktif	<i>Basic human values</i>	Patriotisme konstruktif	Partisipasi sosial	Patriotisme konstruktif mendorong kewargaan aktif	Turki
14	<i>Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Sikap Nasionalisme Warga Negara.</i> Zaskia (2023)	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun nasionalisme	<i>Civic education theory</i>	Nasionalisme, bela negara	Pendidikan (akses & mutu)	PKn membentuk sikap nasionalisme dan kesadaran bela negara	Indonesia
15	<i>Penetrasi Kapital dan Bangkitnya Nasionalisme Etnis di Indonesia.</i> Darsono (2021)	Dampak penetrasi kapital pada kebangkitan nasionalisme etnis	<i>Ethnic citizenship</i>	Nasionalisme etnis	Ketimpangan pembangunan & eksklusi ekonomi	Ketidakadilan ekonomi memicu nasionalisme etnis	Indonesia

Sintesis Temuan

Hasil evaluasi literatur disusun dalam format tematik (lihat Bab Hasil Analisis dan Diskusi) untuk memberikan gambaran mengenai tema-tema umum yang muncul pada karya-karya literatur yang dilampirkan pada Tabel 1. Analisis tematik dilakukan dengan bantuan aplikasi Mendeley Library untuk mengorganisasikan karya literatur sesuai tema yang muncul.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis terhadap 15 artikel yang direview dalam rentang 2014–2024 menunjukkan empat pola temuan utama mengenai hubungan antara kesejahteraan, kewargaan, dan kesadaran Bela Negara. Sintesis dilakukan melalui identifikasi tema-tema berulang yang muncul dalam berbagai konteks penelitian—meliputi kajian hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka Bela Negara (Taupan, 2023; Khasanah et al., 2022), studi tentang media dan narasi ekstremisme yang mempengaruhi identitas kewargaan (Suprabowo, 2020), dinamika kemiskinan dan ketimpangan (Damián, 2019; Sugiharti et al., 2022; Darsono, 2021), literasi budaya dan pendidikan kewargaan (Ahsani & Azizah, 2021; Saskia, 2023), kewargaan digital (Pradana, 2018), peran pendidikan tinggi dalam pengembangan kapabilitas kewargaan (Sanz et al., 2017), ekspansi kesejahteraan melalui memori kolektif (Ugaz, 2024), dinamika kewargaan di wilayah perbatasan (Lamidi, 2023) hingga patriotisme konstruktif dan kewargaan organisasi dalam pelayanan publik(Elban & Aslan, 2023; Rizaie et al., 2023), serta transformasi kewargaan dalam konteks neoliberal (Bell, 2016). Melalui proses pengelompokan tematik inilah empat mekanisme utama terbentuk: kesejahteraan sebagai fondasi kewargaan substantif, kewargaan sebagai praktik sosial, patriotisme konstruktif sebagai penggerak partisipasi, dan integrasi ketiganya dalam penguatan Bela Negara.

Tema 1 – Kesejahteraan sebagai Fondasi Kewargaan Substantif

Literatur menunjukkan bahwa kesejahteraan merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya kewargaan substantif yang memungkinkan warga menjalankan hak

sipil dan politik secara penuh. (Damián, 2019) menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan dan akses sosial di Meksiko menghambat warga miskin untuk menikmati hak-hak kewargaan secara setara, sehingga memunculkan bentuk kewargaan yang terfragmentasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Ugaz, 2024) yang menunjukkan bagaimana perluasan program kesejahteraan berbasis memori kolektif membantu memperkuat legitimasi kewargaan di Amerika Latin. Secara keseluruhan, literatur memperlihatkan bahwa tanpa pemenuhan hak sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang Dimana kewargaan hanya menjadi kategori legal, bukan pengalaman yang dapat dijalani warga secara substansial. Sintesis temuan ini menguatkan bahwa akses kesejahteraan adalah fondasi struktural bagi kualitas kewargaan di berbagai konteks negara.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kemiskinan dan kewargaan terlihat jelas dalam penelitian (Sugiharti et al., 2022) yang menunjukkan bahwa kemiskinan kronis menurunkan tingkat partisipasi sosial, membatasi peluang ekonomi, dan melemahkan rasa memiliki terhadap komunitas. (Darsono, 2021) menambahkan bahwa ketimpangan pembangunan yang tidak merata mendorong munculnya nasionalisme etnis karena kelompok marginal merasa tidak diakomodasi oleh negara. Kondisi ini menggambarkan bahwa kurangnya kesejahteraan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi berdampak langsung pada kapasitas warga untuk terlibat dalam aktivitas kewargaan dan mendukung tujuan kolektif seperti Bela Negara. Sintesis dari penelitian Indonesia menegaskan bahwa kemiskinan struktural melemahkan kapabilitas kewargaan sekaligus menurunkan solidaritas nasional.

Selain aspek ekonomi, literatur juga menyoroti pentingnya peningkatan kapabilitas kewargaan melalui akses pendidikan dan layanan publik yang merata. (Sanz et al., 2017) menekankan bahwa pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk kapabilitas sosial warga, meningkatkan peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Penelitian (Lamidi, 2023) di wilayah perbatasan Indonesia memperlihatkan bahwa akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang secara langsung memperkuat rasa memiliki dan loyalitas warga terhadap negara. Dengan demikian, pembangunan

kapabilitas melalui distribusi layanan publik bukan hanya meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat dimensi kewargaan substantif. Sintesis temuan ini memperjelas bahwa pembangunan kapabilitas sosial melalui pendidikan dan layanan publik merupakan mekanisme kunci yang menghubungkan kesejahteraan dengan penguatan kewargaan.

Tema 2 – Kewargaan sebagai Praktik Sosial (Budaya, Digital, Partisipatoris)

Literatur menunjukkan bahwa praktik kewargaan dibentuk melalui modal kultural warga, terutama kemampuan memahami keberagaman dan berinteraksi secara sosial. (Ahsani & Azizah, 2021) menunjukkan bahwa literasi budaya memperkuat empati, solidaritas, dan keterampilan sosial siswa, sehingga memungkinkan mereka menjalankan kewargaan secara lebih reflektif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan temuan (Saskia, 2023) bahwa pendidikan kewarganegaraan menumbuhkan rasa kebangsaan dan kepedulian sosial, yang menjadi dasar bagi partisipasi warga dalam kegiatan kolektif. Pada tingkat normatif, Taupan (2023) dan Khasanah et al., (2022) menegaskan bahwa pemahaman hak dan kewajiban warga negara memperluas kesadaran untuk berkontribusi terhadap kehidupan publik. Sintesis dari berbagai penelitian ini memperlihatkan bahwa literasi budaya dan pendidikan kewarganegaraan membentuk fondasi kewargaan sosial yang mempengaruhi kapasitas warga untuk terlibat dalam aktivitas publik.

Perkembangan teknologi digital menciptakan ruang baru bagi warga untuk menjalankan kewargaan secara aktif. Pradana (2018) menegaskan bahwa kemampuan memilah informasi, menganalisis pesan digital, dan memahami etika berkomunikasi menjadi prasyarat bagi keterlibatan warga negara dalam ruang publik daring. Namun, Suprabowo (2020) menunjukkan bahwa ruang digital juga dapat menjadi arena manipulasi narasi ekstremisme yang melemahkan identitas kewargaan apabila literasi digital tidak memadai. Dalam konteks ini, kewargaan digital bukan hanya persoalan akses teknologi, tetapi kemampuan kognitif dan etis warga untuk menavigasi informasi dan berpartisipasi secara sehat. Sintesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewargaan digital berfungsi sebagai perpanjangan kewargaan

sosial, di mana literasi digital menentukan kualitas partisipasi dan ketahanan ideologis warga.

Praktik kewargaan juga terlihat pada bagaimana kelompok marginal membangun agency untuk menuntut hak dan mengatasi eksklusi sosial. Dalam konteks Indonesia, Khasanah et al. (2022) menegaskan bahwa penguatan nilai Bela Negara dalam pendidikan membantu mengembangkan kesadaran kolektif yang mendorong keterlibatan komunitas. Temuan-temuan ini menempatkan kewargaan sebagai praktik sosial yang bersifat dinamis, dipengaruhi kondisi material, dan diwujudkan melalui tindakan sehari-hari. Sintesisnya menunjukkan bahwa kewargaan partisipatoris tumbuh ketika warga, terutama kelompok rentan, memiliki ruang untuk menegosiasikan hak dan berkontribusi dalam pembangunan sosial.

Tema 3 – Patriotisme Konstruktif dan Bela Negara

Literatur menunjukkan bahwa patriotisme konstruktif merupakan faktor penting dalam pembentukan kewargaan aktif yang tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga berorientasi pada tindakan. Elban dan Aslan (2023) menemukan bahwa nilai-nilai humanistik seperti empati, solidaritas, dan kepedulian sosial mendorong warga untuk terlibat dalam aktivitas publik, termasuk kegiatan demokratis dan aksi komunitas. Temuan ini diperkuat oleh Rizaie et al. (2023), yang menunjukkan bahwa patriotisme konstruktif dalam sektor kesehatan meningkatkan perilaku kewargaan organisasi (OCB) selama masa pandemi, memperlihatkan bahwa rasa cinta tanah air yang reflektif dapat menghasilkan kinerja publik yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan Indonesia, (Saskia, 2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menanamkan patriotisme yang tidak dogmatis, melainkan berakar pada kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Sintesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa patriotisme konstruktif berfungsi sebagai penggerak utama yang menghubungkan identitas kebangsaan dengan partisipasi kewargaan aktif.

Pembahasan literatur juga menunjukkan bahwa Bela Negara tidak hanya dipahami sebagai kewajiban militer, tetapi sebagai praktik kewargaan yang

melibatkan partisipasi warga dalam pembangunan sosial. Khasanah et al., (2022) menekankan peran pendidikan Bela Negara dalam memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dan kesediaan berkontribusi pada kemaslahatan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Taupan (2023) yang menjelaskan bahwa hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 memuat dimensi Bela Negara sebagai kontribusi sosial, bukan hanya pertahanan fisik. Dalam berbagai konteks, Bela Negara muncul sebagai ekspresi kewargaan partisipatoris yang diwujudkan melalui pembangunan komunitas, kerja sukarela, dan penguatan ketahanan sosial. Sintesis ini memperlihatkan bahwa Bela Negara menjadi lebih efektif ketika dipahami sebagai tindakan sosial warga yang didukung oleh nilai patriotisme konstruktif.

Dalam konteks global, perubahan struktur negara dalam era neoliberal turut memengaruhi pemaknaan patriotisme dan kewargaan. Bell (2016) menunjukkan bahwa ketika tanggung jawab negara terhadap layanan sosial semakin beralih ke mekanisme pasar, kewargaan menjadi lebih kondisional dan terfragmentasi. Dampaknya bagi Bela Negara adalah melemahnya rasa keterikatan warga jika negara tidak hadir melalui kebijakan sosial yang memadai. Namun, literatur juga mengindikasikan bahwa melalui pembangunan kapabilitas warga dan partisipasi komunitas, nilai-nilai patriotisme konstruktif tetap dapat dikembangkan meskipun dalam konteks neoliberal. Sintesis temuan ini menegaskan bahwa efektivitas Bela Negara sangat dipengaruhi oleh sejauh mana negara mampu menjaga kehadiran sosialnya dan memperkuat rasa memiliki warga melalui kebijakan yang inklusif.

Tema 4 – Mekanisme Integratif: Kesejahteraan ↔ Kewargaan ↔ Bela Negara

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa kesejahteraan merupakan titik awal dari mekanisme kewargaan yang lebih luas. Berbagai studi, seperti Damián (2019), Sugiharti et al. (2022), Darsono (2021), menunjukkan bahwa ketimpangan dan kemiskinan mengurangi kapabilitas dasar warga, mulai dari akses pendidikan hingga stabilitas ekonomi yang berfungsi sebagai prasyarat partisipasi sosial. Sanz et al., (2017) menegaskan bahwa pendidikan berkontribusi pada pengembangan kapabilitas kewargaan, sementara Ugaz (2024) menunjukkan bagaimana kebijakan

kesejahteraan berbasis memori kolektif memperkuat legitimasi kewargaan. Dalam konteks Indonesia, Lamidi (2023) menunjukkan bahwa akses layanan publik di wilayah perbatasan meningkatkan rasa memiliki terhadap negara. Sintesis dari semua artikel ini menunjukkan mekanisme pertama: kesejahteraan membentuk kapabilitas sosial warga, yang selanjutnya memperkuat kewargaan substantif.

Literatur menunjukkan bahwa kewargaan substantif yang muncul ketika hak sosial terpenuhi dan membuka jalan bagi partisipasi aktif dalam berbagai bentuk Bela Negara. Ahsani dan Azizah (2021) dan Saskia (2023) menunjukkan bahwa literasi budaya dan pendidikan kewarganegaraan memperkuat kesadaran kebangsaan. Pradana (2018) menambahkan bahwa kapabilitas digital memampukan warga berpartisipasi dalam ruang publik daring. Khasanah et al. (2022) dan Taupan (2023) menegaskan bahwa kewargaan berbasis nilai-nilai Bela Negara meningkatkan komitmen sosial. Sintesisnya memperlihatkan mekanisme kedua: ketika kewargaan substantif terbentuk, kapasitas partisipasi meningkat, yang kemudian memperluas keterlibatan warga dalam Bela Negara sebagai praktik sosial.

Dimensi emosional berupa *membership* dan *belonging* menjadi elemen penting dalam mekanisme hubungan antara kesejahteraan dan Bela Negara. Penelitian Elban dan Aslan (2023) dan Rizaie et al. (2023) menunjukkan bahwa patriotisme konstruktif meningkatkan loyalitas warga dan perilaku sosial positif. Sementara itu, Suprabowo (2020) memperlihatkan bagaimana narasi ekstremisme digital dapat mengikis identitas kewargaan jika negara gagal hadir melalui kebijakan sosial yang adil. Bell (2016) menunjukkan bahwa dalam model neoliberal, absennya negara dalam penyediaan kesejahteraan membuat kewargaan menjadi kondisional, sehingga *belonging* menurun. Sintesis seluruh temuan ini memperlihatkan mekanisme ketiga: kesejahteraan yang inklusif memperkuat *belonging*, dan *belonging* memperkuat motivasi warga untuk terlibat dalam Bela Negara.

Tema 5 – Variasi Konteks, Gap Penelitian, dan Implikasi

Analisis lintas negara dari 16 artikel memperlihatkan variasi konteks kewargaan yang kuat, namun menunjukkan pola mekanistik yang konsisten. Studi di

Meksiko dan Amerika Latin (Damián, 2019; Ugaz, 2024) menyoroti bahwa ketimpangan historis melemahkan kewargaan substantif, sementara di Inggris, Bell (2016) mencatat pergeseran kewargaan dalam konteks neoliberal, sedangkan di Turki (Elban & Aslan, 2023; Rizaie et al., 2023) patriotisme konstruktif dan komitmen profesional muncul sebagai bentuk kewargaan aktif. Indonesia memperlihatkan pola serupa melalui literasi budaya, kewargaan digital, dinamika perbatasan, dan kemiskinan struktural (Ahsani & Azizah, 2021; Pradana, 2018; Lamidi, 2023; Sugiharti et al., 2022; Darsono, 2021). Sintesis dari berbagai konteks ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi sosial berbeda, kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara saling berinteraksi melalui mekanisme yang serupa: kapabilitas → partisipasi → solidaritas nasional.

SLR ini juga mengidentifikasi sejumlah gap penelitian yang penting. Pertama, sebagian besar studi berfokus pada aspek kualitatif dan naratif, sementara hubungan mekanistik antara kesejahteraan dan Bela Negara masih kurang diuji secara kuantitatif. Kedua, terdapat keterbatasan konteks: meskipun ada studi Indonesia (Sugiharti et al., 2022; Saskia, 2023; Pradana, 2018) kajian empiris spesifik tentang bagaimana warga memaknai Bela Negara dalam kehidupan sehari-hari masih minim. Ketiga, hanya sedikit penelitian yang mengintegrasikan dimensi digital, budaya, dan ekonomi dalam satu kerangka kewargaan komprehensif. Selain itu, wilayah rentan seperti perbatasan (Lamidi, 2023) masih belum mendapat perhatian memadai dalam konteks Bela Negara. Sintesis gap ini menegaskan bahwa studi kewargaan di Indonesia perlu memperluas pendekatan metodologis dan fokus wilayah untuk memahami dinamika kewargaan secara lebih menyeluruh.

Hasil sintesis dari lima tema memperlihatkan bahwa penguatan Bela Negara di Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan kebijakan kesejahteraan, literasi kewargaan, dan ruang partisipasi sosial. Studi-studi yang dianalisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak sosial (Sanz et al., 2017), pembangunan kapabilitas warga (Ahsani & Azizah, 2021), perlindungan identitas kolektif (Saskia, 2023), serta mitigasi pengaruh negatif media digital (Suprabowo, 2020) menjadi faktor yang memperkuat kewargaan substantif. Kebijakan inklusif di

wilayah perbatasan (Lamidi, 2023) dan upaya mereduksi eksklusi ekonomi (Sugiharti et al., 2022; Darsono, 2021) juga berperan besar dalam meningkatkan solidaritas nasional. Sintesis akhir ini menegaskan bahwa Bela Negara hanya dapat diperkuat ketika negara hadir melalui kebijakan sosial yang adil, dan warga memiliki ruang serta kapabilitas untuk menjalankan kewargaan secara aktif.

Interpretasi Temuan tentang Peran Kesejahteraan dalam Kewargaan Substantif

Hasil SLR pada Tema 1 memperlihatkan bahwa kesejahteraan bukan sekadar kondisi ekonomi, tetapi merupakan basis struktural yang memungkinkan warga mengakses hak sipil dan politik secara penuh. Temuan (Damián (2019), Sugiharti et al. (2022), dan Darsono (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan kemiskinan kronis membatasi kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, sehingga mengonfirmasi pandangan Marshall tentang pentingnya “hak sosial” sebagai fondasi kewargaan. Dalam konteks teori, ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan dasar—pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang bukan hanya kebijakan teknis, tetapi prasyarat pembentukan kewargaan substantif yang memungkinkan warga menjalankan hak politik dan sipilnya secara setara. Sintesis ini menegaskan bahwa teori Marshall tetap relevan, tetapi temuan SLR memperluas aplikasinya dengan menunjukkan bagaimana ketidaksetaraan struktural secara langsung melemahkan pembentukan kewargaan di negara-negara berkembang.

Temuan SLR juga menunjukkan bahwa kesejahteraan membentuk kewargaan melalui pembangunan kapabilitas sosial warga. Sanz et al. (2017) menekankan peran pendidikan dalam memperluas pilihan hidup dan peluang partisipasi, sementara Lamidi (2023) membuktikan bahwa akses layanan publik di wilayah perbatasan Indonesia meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan loyalitas warga terhadap negara. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan kesejahteraan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan menghambat terbentuknya kapabilitas individu untuk terlibat dalam kewargaan. Di Indonesia, kasus kemiskinan kronis yang diidentifikasi Sugiharti et al. (2022) memperlihatkan bahwa rumah tangga dengan akses pendidikan dan aset rendah memiliki tingkat partisipasi sosial yang jauh lebih

kecil. Sintesisnya: kapabilitas warga merupakan mekanisme perantara yang menjelaskan bagaimana peningkatan kesejahteraan dapat memperkuat kualitas kewargaan dan mendukung tujuan Bela Negara.

Hasil SLR memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial yang menjadi prasyarat partisipasi kolektif dalam Bela Negara. Penelitian Ugaz (2024) tentang program kesejahteraan berbasis memori kolektif bahwa kebijakan kesejahteraan yang inklusif mampu memperkuat rasa keadilan sosial, sehingga meningkatkan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Dalam konteks Indonesia, Darsono (2021) mengingatkan bahwa ketimpangan antarwilayah dapat memicu nasionalisme etnis ketika negara tidak hadir dalam penyediaan kesejahteraan. Sintesis temuan ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan berfungsi sebagai penguat solidaritas nasional yang pada akhirnya memperkuat komitmen warga terhadap Bela Negara sebagai proyek sosial kolektif.

Dinamika Praktik Kewargaan dan Relevansinya bagi Indonesia

Hasil SLR pada Tema 2 menunjukkan bahwa kewargaan tidak hanya dibentuk oleh identitas hukum, tetapi juga oleh modal sosial dan kultural yang dikembangkan melalui pendidikan. Ahsani dan Azizah (2021) menunjukkan bahwa literasi budaya memperkuat empati dan kemampuan memahami keberagaman, sedangkan Saskia (2023) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan menumbuhkan rasa kebangsaan dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka teori kewargaan partisipatoris, literasi budaya ini berfungsi sebagai modal reflektif yang memungkinkan warga mengembangkan sikap inklusif dan kesediaan untuk berkolaborasi dalam kehidupan publik. Konteks Indonesia memperlihatkan bahwa sekolah dan ruang pendidikan informal menjadi arena penting dalam pembentukan modal sosial warga, terutama bagi generasi muda yang menghadapi ragam perbedaan etnis dan agama. Sintesisnya menegaskan bahwa literasi budaya menjadi komponen penting dalam membangun kewargaan reflektif yang relevan untuk mengatasi fragmentasi sosial di Indonesia.

Temuan SLR juga menyoroti bagaimana kewargaan digital membentuk kualitas partisipasi di ruang publik daring. Pradana (2018) menunjukkan bahwa kemampuan warga dalam memilah informasi dan memahami etika media digital menentukan efektivitas partisipasi mereka dalam diskusi publik. Temuan ini menjadi semakin relevan ketika dibandingkan dengan penelitian Suprabowo (2020), yang menunjukkan bagaimana narasi ekstremisme digital dapat mengikis identitas kewargaan apabila literasi digital tidak memadai. Dalam konteks Indonesia, maraknya hoaks pemilu, ujaran kebencian berbasis SARA, dan kampanye politik digital memperlihatkan bahwa keterampilan kewargaan digital kini menjadi kebutuhan mendesak, bukan tambahan. Sintesis ini menjelaskan bahwa kewargaan digital berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kualitas informasi, sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam ruang publik demokratis.

SLR juga menemukan bahwa kewargaan tidak selalu tumbuh dari kondisi sejahtera; dalam beberapa kasus, marginalisasi justru mendorong warga untuk mengembangkan kewargaan partisipatoris sebagai bentuk perjuangan hak. Penelitian Khasanah et al. (2022) dan Taupan (2023) menunjukkan bahwa nilai-nilai Bela Negara dalam pendidikan dapat memperkuat kesadaran kolektif untuk terlibat dalam isu kemasyarakatan. Sintesisnya menegaskan bahwa kewargaan partisipatoris tumbuh ketika warga memiliki ruang untuk menegosiasikan hak dan mengorganisasikan solidaritas, sehingga menjadikan kewargaan sebagai praktik sosial yang dinamis, bukan hanya atribut legal.

Makna Patriotisme Konstruktif dalam Kerangka Bela Negara Modern

Temuan SLR memperlihatkan bahwa patriotisme konstruktif berperan sebagai pendorong kewargaan aktif yang berorientasi pada tindakan sosial, bukan sekadar simbolisme nasional. Elban dan Aslan (2023) menekankan bahwa nilai-nilai universalitas, kebaikan, dan empati membentuk patriotisme yang reflektif dan mendorong warga untuk terlibat dalam kegiatan demokratis. Rizaie et al. (2023) menambahkan bahwa dalam sektor kesehatan, patriotisme konstruktif memperkuat perilaku kewargaan organisasi (OCB) yang meningkatkan kualitas pelayanan publik

selama pandemi, menunjukkan bahwa cinta tanah air dapat terwujud dalam kontribusi profesional. Dalam konteks Indonesia, Zaskia (2023) menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan memperkuat pemahaman kritis siswa tentang nasionalisme sehingga mereka mampu mengidentifikasi isu sosial dan berpartisipasi secara aktif dalam komunitas. Sintesisnya: patriotisme konstruktif berfungsi sebagai katalis yang menghubungkan identitas nasional dengan praktik kewargaan yang nyata, terutama dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer.

Interpretasi terhadap temuan SLR menunjukkan bahwa konsep Bela Negara mengalami pergeseran dari paradigma pertahanan militer menuju paradigma sosial-kewargaan yang menekankan peran warga dalam pembangunan sosial. Khasanah et al. (2022) menunjukkan bahwa pendidikan Bela Negara di sekolah mampu membentuk kesadaran kolektif dan rasa tanggung jawab publik. Taupan (2023) menegaskan bahwa amanat konstitusi UUD 1945 memposisikan Bela Negara sebagai kontribusi warga untuk kemaslahatan umum, bukan hanya kesiapsiagaan militer. Dalam konteks sosial modern, konsep ini lebih relevan ketika dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam penanganan kemiskinan, solidaritas sosial, dan pembangunan komunitas. Sintesisnya: perluasan makna Bela Negara menunjukkan bahwa ketahanan nasional modern lebih ditentukan oleh kontribusi sosial warga daripada dimensi pertahanan formal semata.

Beberapa temuan menunjukkan bahwa patriotisme konstruktif menghadapi tantangan dalam konteks neoliberal yang memosisikan warga sebagai aktor pasar. Bell (2016) menunjukkan bahwa kewargaan dalam sistem neoliberal menjadi lebih kondisional karena negara mengalihkan peran-peran kesejahteraan kepada mekanisme pasar. Dalam konteks ini, rasa memiliki (*belonging*) dan loyalitas terhadap negara dapat melemah ketika warga merasa negara kurang hadir dalam penyediaan layanan dasar. Namun, sintesis temuan dari Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, kebijakan sosial yang inklusif, dan penguatan komunitas dapat menahan dampak erosif neoliberalisme terhadap identitas kewargaan. Sintesis akhir: keberhasilan Bela Negara modern sangat bergantung pada kemampuan negara mempertahankan kehadiran sosialnya dan memperkuat

patriotisme konstruktif melalui kebijakan yang adil dan komitmen terhadap kesejahteraan warga.

Analisis Mekanisme Integratif Kesejahteraan–Kewargaan–Bela Negara

Interpretasi terhadap temuan SLR memperjelas bahwa mekanisme pertama dalam integrasi kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara terletak pada hubungan struktural antara kondisi material warga dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara setara. Penelitian Damián (2019), Sugiharti et al. (2022), dan Darsono (2021) menunjukkan bahwa ketimpangan sosial dan kemiskinan kronis menghambat pembentukan kapabilitas warga untuk terlibat dalam kegiatan sosial maupun politik. Temuan ini sejalan dengan teori Marshall yang menekankan pentingnya hak sosial sebagai prasyarat bagi kewargaan substantif. Pendidikan dan layanan publik yang inklusif, sebagaimana ditekankan oleh Sanz et al. (2017) dan Lamidi (2023), memperluas kapabilitas warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitas. Sintesisnya: kesejahteraan berfungsi sebagai fondasi yang menciptakan kapabilitas kewargaan, dan kapabilitas inilah yang menentukan kualitas partisipasi warga dalam kehidupan publik.

Mekanisme kedua yang muncul dari Sintesis SLR adalah bahwa kewargaan substantif yang terbentuk ketika hak sosial terpenuhi sehingga mendorong warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial yang terkait dengan Bela Negara. Ahsani dan Azizah (2021) dan Saskia (2023) menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memperkuat nilai solidaritas dan kesadaran kebangsaan yang menjadi dasar partisipasi sosial. Pradana (2018) memperlihatkan bahwa kapabilitas digital membuka ruang baru bagi partisipasi publik. Dalam konteks Indonesia, pemaknaan Bela Negara tidak lagi terbatas pada kesiapan militer, tetapi meluas pada kegiatan sosial seperti kerja bakti, advokasi kebijakan publik, dan pemberdayaan komunitas, sebagaimana ditegaskan Khasanah et al. (2022) dan Taupan (2023). Sintesisnya: kewargaan substantif menghasilkan partisipasi sosial yang kemudian memperkuat Bela Negara sebagai praktik kewargaan dalam kehidupan sehari-hari.

Mekanisme integratif ketiga yang ditemukan dalam SLR adalah peran dimensi emosional kewargaan berupa *membership* dan *belonging*. Temuan Rizaie et al. (2023) dan Elban dan Aslan (2023) menunjukkan bahwa ketika warga merasa dihargai dan dilibatkan, loyalitas serta komitmen terhadap negara meningkat melalui praktik patriotisme konstruktif. Sebaliknya, Suprabowo (2020) menunjukkan bagaimana kerentanan pada ruang digital dapat mengikis identitas kewargaan jika negara gagal menyediakan rasa aman dan keadilan sosial. Ini sejalan dengan kritik Bell (2016) bahwa kewargaan dalam konteks neoliberal cenderung melemahkan rasa memiliki warga ketika negara menarik diri dari penyediaan layanan sosial. Dalam konteks Indonesia, kasus ketimpangan antarwilayah, kesenjangan akses digital, dan perasaan ditinggalkan oleh negara sering kali memengaruhi seberapa besar warga bersedia terlibat dalam program Bela Negara. Sintesis akhir: mekanisme emosional menunjukkan bahwa keberhasilan Bela Negara bergantung pada kemampuan negara menciptakan rasa memiliki melalui keadilan sosial dan kehadiran negara dalam kehidupan warga.

Implikasi Temuan Lintas Negara bagi Kebijakan dan Kajian Indonesia

Temuan SLR menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara memiliki pola umum meskipun terjadi dalam konteks sosial yang berbeda. Studi di Amerika Latin (Ugaz, 2024; Damián, 2019) menegaskan bahwa ketidakadilan historis dan kesejahteraan yang tidak merata melemahkan kepercayaan warga terhadap negara. Di Inggris, (Bell, 2016) menunjukkan bahwa kewargaan neoliberal berisiko menggerus hak sosial sehingga melemahkan solidaritas nasional. Jika dibandingkan dengan Indonesia, tantangan yang serupa muncul pada konteks kemiskinan kronis, ketimpangan wilayah, dan keterbatasan akses digital. Pola-pola ini menunjukkan bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara lain tentang pentingnya memperluas hak sosial sebagai strategi membangun kewargaan substantif. Sintesis paragraf ini menegaskan bahwa Indonesia berada dalam spektrum global yang sama, sehingga kebijakan sosial inklusif menjadi prasyarat mutlak untuk memperkuat kewargaan dan Bela Negara.

SLR juga mengungkapkan sejumlah celah penelitian yang perlu dijembatani untuk memperdalam pemahaman tentang kewargaan dan Bela Negara di Indonesia. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada pendekatan kualitatif dan naratif sehingga mekanisme hubungan antar variabel, terutama bagaimana kesejahteraan memengaruhi kapabilitas kewargaan dan rasa memiliki yang belum diuji secara kuantitatif dan longitudinal. Selain itu, sedikit studi yang menyoroti kewargaan digital dalam konteks penguatan Bela Negara, padahal tantangan disinformasi dan ujaran kebencian sangat signifikan di Indonesia. Penelitian tentang wilayah marginal seperti perbatasan (Lamidi, 2023) atau komunitas adat juga masih terbatas, padahal kelompok ini paling terdampak oleh ketidakadilan sosial. Sintesisnya: terdapat peluang besar untuk mengembangkan kajian Bela Negara berbasis pendekatan multidisipliner dan metode campuran, terutama untuk menjelaskan mekanisme psikososial dan digital yang belum banyak diteliti.

Interpretasi menyeluruh dari lima tema SLR menunjukkan bahwa penguatan Bela Negara di Indonesia memerlukan pendekatan integratif yang menghubungkan kesejahteraan sosial, pendidikan kewarganegaraan, literasi digital, dan pembangunan komunitas. Temuan dari Sanz et al. (2017), Ahsani dan Azizah (2021), dan Saskia (2023) menunjukkan bahwa pendidikan formal dan nonformal dapat meningkatkan kapabilitas warga dan memperkuat identitas kebangsaan. Sementara itu, Sugiharti et al. (2022), Darsono (2021), dan Lamidi (2023) menegaskan bahwa kebijakan sosial yang inklusif dan distribusi layanan publik yang merata menjadi kunci untuk menciptakan rasa keadilan dan *belonging*. Dalam konteks digital, Pradana (2018) dan Suprabowo (2020) menunjukkan bahwa literasi digital berkaitan langsung dengan ketahanan informasi dan kemampuan warga terlibat secara sehat dalam ruang publik daring. Sintesis akhir: kebijakan Bela Negara yang bertumpu pada kesejahteraan, pendidikan, dan ketahanan digital akan memperkuat kohesi nasional dan memastikan warga memiliki kapabilitas serta motivasi untuk berkontribusi pada proyek kebangsaan.

Meneguhkan Relasi Kewargaan, Kesejahteraan, dan Bela Negara dalam Bingkai Indonesia Modern

Pembahasan dari keseluruhan tema menegaskan bahwa kewargaan, kesejahteraan, dan Bela Negara merupakan tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika sosial-politik Indonesia. Kesejahteraan menjadi fondasi material yang melahirkan kapabilitas dasar warga negara, sementara kewargaan substantif muncul ketika hak-hak sosial terpenuhi dan warga mampu berpartisipasi secara sadar dalam kehidupan publik. Bela Negara kemudian menjadi manifestasi kolektif dari kedua elemen tersebut, karena warga yang sejahtera dan memiliki kapabilitas cenderung menunjukkan partisipasi aktif dan loyalitas yang lebih kuat terhadap negara. Integrasi ini memperlihatkan bahwa penguatan Bela Negara tidak hanya bersifat ideologis, tetapi harus ditopang oleh keadilan sosial sebagai prasyaratnya.

Sintesis pembahasan juga menampilkan bahwa kesejahteraan sosial memainkan peran sebagai pengungkit utama dalam pembentukan kewargaan substantif. Ketika warga memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial, mereka menunjukkan kapasitas yang lebih besar untuk berperan dalam praktik kewargaan reflektif dan partisipatoris. Pola ini konsisten di berbagai konteks negara dalam temuan SLR, namun menjadi sangat penting dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi ketimpangan struktural. Melalui pemerataan kesejahteraan, negara bukan hanya memenuhi hak dasar warga, tetapi juga memperkuat basis pembentukan masyarakat yang kohesif dan responsif terhadap agenda pembangunan nasional.

Di sisi lain, kewargaan sebagai praktik sosial menunjukkan bahwa identitas kebangsaan modern dibangun melalui interaksi warga dengan ruang sosial, budaya, dan digital yang terus berubah. Literasi budaya membantu memperkuat empati dan pemahaman lintas identitas, sementara kewargaan digital menuntut kemampuan bernalar kritis dalam menghadapi arus informasi yang kompleks. Praktik kewargaan ini memperluas dimensi Bela Negara dari ranah tradisional menuju bentuk-bentuk partisipasi yang lebih sesuai dengan zaman, seperti kolaborasi komunitas, advokasi

publik, dan aksi sosial berbasis solidaritas. Dengan demikian, kewargaan menjadi arena penting yang menjembatani kesejahteraan dan Bela Negara dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Pembahasan ini juga menggarisbawahi bahwa dimensi emosional berupa *belonging* dan *membership* memainkan peran sentral dalam keberlanjutan Bela Negara. Warga yang merasa diakui, dihargai, dan didukung secara sosial menunjukkan tingkat komitmen kebangsaan yang lebih tinggi. Rasa memiliki ini tumbuh bukan hanya dari narasi nasionalisme, tetapi dari kehadiran negara dalam menyediakan keadilan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan akses layanan publik yang setara. Oleh karena itu, keberhasilan program Bela Negara, baik melalui pendidikan, kampanye publik, maupun kebijakan nasional yang sangat ditentukan oleh sejauh mana warga merasakan kehadiran negara dalam kehidupan mereka.

Akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi antara kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara harus menjadi orientasi utama dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Upaya memperkuat Bela Negara bukan hanya soal sosialisasi nilai atau kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga mengenai bagaimana negara menciptakan lingkungan sosial yang adil, inklusif, dan memungkinkan setiap warga mengembangkan potensi terbaiknya. Sintesis dari berbagai temuan memperkaya wacana kewargaan Indonesia dengan menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak dapat dilepaskan dari kesejahteraan dan kapabilitas warga negara. Pada akhirnya, Indonesia yang tangguh adalah Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan, memupuk kewargaan aktif, dan menumbuhkan komitmen Bela Negara secara simultan.

Kesimpulan

Sintesis atas lima tema utama hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan antara kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara dibentuk melalui mekanisme yang saling menguatkan. Pemenuhan hak sosial terbukti menjadi fondasi bagi terbentuknya kapabilitas kewargaan substantif; kapabilitas ini kemudian memungkinkan warga berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan publik.

Partisipasi tersebut menguatkan praktik Bela Negara dalam bentuk kontribusi sosial sehari-hari, sehingga ketiga konsep tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sebagai satu sistem yang menentukan kualitas ketahanan nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana kewargaan di Indonesia dengan menunjukkan bahwa kualitas kewargaan tidak hanya ditentukan oleh pemahaman normatif mengenai hak dan kewajiban, tetapi sangat dipengaruhi oleh akses terhadap kesejahteraan sosial, peluang pengembangan kapabilitas, dan rasa memiliki (*belonging*) terhadap negara. Temuan ini memperluas horizon pemahaman Bela Negara di Indonesia: bukan lagi sebagai tugas militeristik atau simbolik, tetapi sebagai praktik sosial yang mengakar pada keadilan sosial, literasi budaya, kemampuan digital, serta solidaritas warga dalam menghadapi kerentanan sosial-ekonomi.

Secara kebijakan, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk memperkuat hubungan kesejahteraan-kewargaan-Bela Negara. Kebijakan prioritas meliputi: pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah rentan; penguatan literasi digital untuk menanggulangi disinformasi; perluasan program perlindungan sosial berbasis kapabilitas; pengembangan kurikulum PKn yang mengintegrasikan perspektif patriotisme konstruktif; serta intervensi pembangunan komunitas di wilayah perbatasan. Kebijakan ini penting untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan warga menjalankan kewargaan substantif dan berkontribusi pada ketahanan nasional.

Penelitian ini memiliki batasan pada fokus literatur sekunder dan belum menguji secara empiris hubungan mekanistik antara kesejahteraan, kewargaan, dan Bela Negara. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan metode kuantitatif maupun campuran untuk menguji kekuatan hubungan antarvariabel, termasuk analisis longitudinal terhadap pengaruh ketimpangan sosial terhadap rasa memiliki. Studi mendatang juga dapat mengeksplorasi dinamika kewargaan digital di Indonesia, praktik Bela Negara di komunitas paling rentan, dan perbandingan lintas wilayah untuk memetakan disparitas sosial yang memengaruhi kapabilitas kewargaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa memperkuat Bela Negara tidak cukup melalui pendidikan normatif atau mobilisasi simbolik, tetapi harus dimulai dari upaya nyata memperluas kesejahteraan dan kapabilitas warga. Dengan demikian, temuan ini menawarkan landasan konseptual bagi Indonesia untuk membangun kewargaan yang lebih substantif, inklusif, dan berdaya dalam menghadapi tantangan sosial-politik kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ahsani, E. L. F., & Azizah, N. R. (2021). Implementasi literasi budaya dan kewargaan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa madrasah ibtidaiyah di tengah pandemi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 7. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10317>
- Balibar, É., & Swenson, J. (2004). *We, the people of Europe?* Princeton University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7t7t3>
- Bell, E. (2016). From Marshallian citizenship to corporate citizenship: The Changing nature of citizenship in neoliberal Britain. *Revue Française de Civilisation Britannique*, 21(1). <https://doi.org/10.4000/rfcb.850>
- Conceicao, P. (2019). Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today. United Nations Development Program. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019overview-english.pdf>
- Damián, A. (2019). Poverty and inequality in Mexico. The ideological and factual construction of diverse and unequal citizenships. *Trimestre Económico*, 86(343), 623–666. <https://doi.org/10.20430/ete.v86i343.920>
- Darsono, D. (2021). Penetrasi kapital dan bangkitnya nasionalisme etnis di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2), 61. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i2.1786>
- Elban, M., & Aslan, S. (2023). The role of constructive patriotism in the relationship of basic human values and active citizenship for emerging adults in Türkiye. *BMC Psychology*, 11(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s40359-023-01233-z>
- Harwenda, R. W., Angelo, M. D., Budi, I., Santoso, A. B., & Putra, P. K. (2025). Sentiment analysis on government public policies: a systematic literature review. *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science*, 6(5), 4192–4211. <https://doi.org/10.38035/dijemss.v6i5.4699>
- Hiariej, E., & Stokke, K. (2022). *The Politics of Citizenship in Indonesia*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-16-7955-1>
- Khasanah, I. L., Kurnia, H., Lestari, D., & Sari, T. Y. (2022). Memahami konsep bela

negara dan pentingnya diseminasi kepada generasi muda. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal*, 2(1), 33-44.
<https://doi.org/10.47200/aosscij.v2i1.1839>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2017). *Bela negara: Panduan nasional untuk meningkatkan kesadaran bela negara di kalangan warga negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Lamidi, L. (2023). Implementasi Penguatan Bela Negara di Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 40-50.
<https://doi.org/10.31629/juan.v11i01.5946>

Luke, G. (2017). *Towards a more equal Indonesia: How the government can take action to close the gap between the richest and the rest*. Oxfam. <https://policy-practice.oxfam.org/resources/towards-a-more-equal-indonesia-how-the-government-can-take-action-to-close-the-620192/>

Marshall, T. H., & Bottomore, T. (1992). *Citizenship and Social Class*. Pluto Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctt18mvns1>

McNevin, A. (2011). *Contesting Citizenship*. Columbia University Press.
<https://doi.org/10.7312/mcne15128>

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Systematic literature review: Determination of government policy in health and education development for improved human capital. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(1), 92.
<https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13085>

Pradana, Y. (2018). Atribusi kewargaan digital dalam literasi digital. *Untirta Civic Education Journal*, 3(2), 168–182. <https://dx.doi.org/10.30870/ucej.v3i2.4524>

Rizaie, M. E., Horsey, E. M., Ge, Z., & Ahmad, N. (2023). The role of organizational citizenship behavior and patriotism in sustaining public health employees' performance. *Frontiers in Psychology*, 13.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.997643>

Saskia, S. I. (2023). Analisis peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun sikap nasionalisme warga negara. *JOCKER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.8>

Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, J. (2017). Higher education in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain. *Journal of Innovation and Knowledge*, 2(2), 53–66. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.03.002>

Sugiharti, L., Purwono, R., Esquivias, M. A., & Jayanti, A. D. (2022). Poverty dynamics in Indonesia: The prevalence and causes of chronic poverty. *Journal of Population and Social Studies*, 30, 423–447.
<https://doi.org/10.25133/JPSSv302022.025>

Suprabowo, I. (2020). Islamic movement global jihad: Analysis of online media

- framing. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 20(2), 249–263. <https://doi.org/10.18196/aijis.2020.0123.249-262>
- Taupan, A. (2023). Tafsir umum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara menurut UUD 1945. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.7>
- Ugaz, D. C. (2024). Framing welfare expansion: Citizenship, collective memory, and fiscal dilemmas in Mexico and Peru. *Socius*, 10. <https://doi.org/10.1177/23780231231222117>
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>